

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tarakan

Muhammad Tharmizi Junaid^{1✉}, Serliyana²

¹Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, Indonesia.

²Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, Indonesia.

✉Corresponding author: tharmidziee@borneo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tarakan tahun 2018-2022. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah LKPD Kota Tarakan dan yang menjadi sampel adalah LRA Tahun 2018-2020. Teknik analisis dilakukan melalui berbagai rasio keuangan diantaranya, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan serta Rasio Keserasian. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kota Tarakan selama tahun 2018-2020 berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi dalam kategori kurang. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tarakan sangat rendah dengan pola hubungan instuktif, Rasio Efektivitas PAD menunjukkan peningkatan dan penurunan. Rasio Efisiensi keuangan daerah tergolong efisien, Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Daerah Menunjukkan rata-rata Pertumbuhan Positif, Rasio Keserasian Belanja Operasi dan Belanja Modal belum stabil dari tahun ke tahun dimana Pemerintah Kota Tarakan lebih mengutamakan alokasi dana pada belanja operasi dibandingkan belanja modal.

Abstract

This research aims to determine the Financial Performance of Tarakan City Local Government for the period 2018-2022. The type of this research is quantitative descriptive research. The population of this study is the Financial Statements of Tarakan City Local Government (LKPD Kota Tarakan), and the sample is the Financial Report for the years 2018-2020. The analysis technique is conducted through various financial ratios including Degree of Decentralization Ratio, Regional Financial Independence Ratio, Local Revenue Effectiveness Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, Growth Ratio, and Harmony Ratio. The calculation results show that (I) the Financial Performance of Tarakan City Local Government during the years 2018-2020 based on the Degree of Decentralization Ratio falls into the category of insufficient, (II) the Regional Financial Independence Ratio indicates a very low financial capacity of Tarakan City Government with an instructive relationship pattern, (III) the Local Revenue Effectiveness Ratio shows both improvement and decline, (IV) the Regional Financial Efficiency Ratio is considered efficient, (v) the Growth Ratio of Regional Revenue and Expenditure indicates an average positive growth, (VI) the Harmony Ratio of Operational Expenditure and Capital Expenditure is not stable from year to year, where the Tarakan City Government prioritizes fund allocation for operational expenditure over capital expenditure.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2024 Muhammad Tharmizi Junaid, Serliyana.

Article history

Received 2024-02-18

Accepted 2024-02-24

Published 2024-02-26

Kata kunci

Kinerja Keuangan;

Rasio Efisiensi;

Rasio Pertumbuhan

Keywords

Financial Performance;

Efficiency Ratio;

Growth Ratio

1. Pendahuluan

Perkembangan di bidang akuntansi sektor publik saat ini mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan munculnya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap masa depan suatu daerah, karena kemampuan daerah untuk menjadi kuat dan maju sangat tergantung pada cara keuangan daerah tersebut dikelola. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menjamin keutuhan aset daerah tetap terjaga (Sitorus et al., 2023). Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia dan departemen-departemen dibawahnya sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada masyarakat (Purba, 2021).

Pemerintah telah melakukan reformasi hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang lebih dikenal dengan "Otonomi Daerah" karena kesadaran atas tuntutan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan dari pemerintah pusat, bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dengan proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban (Oktrivina et al., 2020).

Dalam menerapkan otonomi daerah, diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya dengan efektif dan efisien, dengan tujuan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah daerah juga diminta untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan, sehingga potensi yang ada di setiap wilayah dapat dioptimalkan. (Pilat & Morasa, 2017). Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu aspek penting yang harus diatur secara hati-hati. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kebijakan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya (Rahmadani & Rudini, 2023).

Pemerintah Pusat kemudian menginstruksikan pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk menunjukkan transparansi dan pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Nordian, 2018). Melalui LKPD dapat diketahui sejauh mana kemampuan daerah dalam pengelolaan keuangannya yang diukur dengan kinerja keuangan daerah (Mardiasmo, 2018).

Anshori (2019) Menyatakan sangat penting melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui seberapa baik pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Dengan menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah, dapat diketahui apakah kinerja keuangan pemerintah meningkat atau menurun dalam setiap tahunnya. Selain itu, dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan kinerja keuangan akan lebih baik pada tahun berikutnya, sehingga akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat .

Sebagai entitas yang bertanggung jawab atas tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Tujuan laporan tersebut adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah berhasil atau tidak dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. (Nurhayati, 2015). Dengan dilakukannya analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat menjadi alat ukur bagi suatu daerah untuk menilai kinerja keuangan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah kota Tarakan pada tahun 2018-2022.

Menurut Donaldson dan Davis (1991), Teori Stewardship adalah kerangka teoritis yang menggambarkan kondisi di mana manajer tidak terutama dimotivasi oleh tujuan individu mereka, melainkan lebih fokus pada pencapaian tujuan utama yang menguntungkan organisasi (Anton, 2010). Menurut Teori Stewardship, pemerintah, yang berperan sebagai pengelola sumber daya

(steward), memiliki tanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengelolaan sumber daya, sedangkan rakyat, sebagai pemilik sumber daya (principal) (Jatmiko, 2020). Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah (Eksandy et al., 2019).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat diukur dengan sejauh mana pencapaian hasil kerja pemerintah daerah, yang melibatkan evaluasi anggaran dan realisasinya dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan oleh kebijakan atau undang-undang selama periode anggaran (Rahmadani & Rudini, 2023).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah sarana yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan terkait kinerja keuangannya kepada publik. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diinspeksi setiap tahun dan dievaluasi dalam bentuk Opini oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK).

2. Metode

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis data keuangan yang telah diperoleh. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data kuantitatif dalam bentuk angka-angka yang diukur menggunakan statistik sebagai alat untuk menghitung dan menguji masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2018). Di sisi lain, analisis data deskriptif adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa maksud membuat kesimpulan yang dapat digeneralisasi untuk umum (Sugiyono, 2018). Penelitian memberikan gambaran tentang kinerja keuangan Pemerintah Kota Tarakan jika diukur dengan Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kesenjangan. Analisis rasio-rasio ini dilakukan untuk memahami dan mengatasi permasalahan yang ada sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan seluruh Laporan Keuangan Pemerintah kota Tarakan sebagai populasi. Sampel yang diambil adalah Laporan Realisasi Anggaran kota Tarakan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Dalam purposive sampling, peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Maka kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018-2022 dan Komponen Laporan Keuangan Pemerintah daerah yaitu Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2022 yang memuat data Pendapatan dan Belanja Daerah.

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu mempelajari teori-teori dan artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Teknik dokumentasi merujuk pada cara pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi sekunder, yang melibatkan penghimpunan data dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tarakan pada periode tahun 2018-2022. Untuk teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kinerja keuangan, yang diukur melalui perhitungan rasio keuangan. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh. Analisis kemudian dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan daerah sebagai berikut :

2.1. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini mencerminkan sejauh mana pendapatan asli daerah memberikan kontribusi terhadap total penerimaan daerah. Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah, semakin besar kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan desentralisasi secara mandiri. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} 100\%$$

Tabel 1. Skala interval Rasio Derajat Desentralisasi

Skala Intreval Derajat Desentralisasi (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01- 50,00	Baik
>50,01	Sangat Baik

2.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Ini ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah dari sumber lain, seperti pinjaman atau bantuan pemerintah pusat (Mahmudi, 2016). Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer}} 100\%$$

Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0% - 25%	Instruktif
Rendah	>25% - 50%	Konsultatif
Sedang	>50% - 75%	Pasrtisipatif
Tinggi (Mandiri)	>75% - 100%	Delegatif

2.3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah dapat mencapai pendapatan asli daerah yang telah direncanakan, dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas pendapatan asli daerah, semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pendapatan asli daerah. (Mahmudi, 2016). Perhitungan

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pedapatan Asli Daerah}} 100\%$$

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

Tabel 3. Skala Interval Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Presentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

2.4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan daerah. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin lebih baik kinerja pemerintah daerah, atau sebaliknya. Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah dapat melakukan penghematan anggaran. Dikategorikan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% (semakin kecil nilai rasio ini semakin baik).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} 100\%$$

2.5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk menilai apakah kinerja anggaran pemerintah mengalami peningkatan atau penurunan pertumbuhan pendapatan dan belanja secara positif atau negatif selama beberapa periode anggaran. Analisis pertumbuhan ini memiliki relevansi penting dalam memahami perkembangan kinerja pendapatan dan belanja daerah. Rasio tersebut mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mempertahankan dan meningkatkan pencapaian yang telah diperoleh dari satu periode ke periode berikutnya. Pengeluaran dan sumber pendapatan untuk setiap komponen dapat dievaluasi untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang memerlukan perhatian khusus. (Mahmudi, 2016). Perhitungan Rasio Pertumbuhan dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan (Xn)} - \text{Realisasi Pendapatan (Xn - 1)}}{\text{Realisasi Pendapatan (Xn - 1)}} 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Belanja (Xn)} - \text{Realisasi Belanja (Xn - 1)}}{\text{Realisasi Belanja (Xn - 1)}} 100\%$$

Keterangan:

Xn = Tahun yang dihitung

Xn-1 = Tahun Sebelumnya

2.6. Rasio Kesenjangan

Rasio Kesenjangan adalah suatu perbandingan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menggambarkan cara mereka mengutamakan alokasi dana antara Belanja Operasional dan Belanja

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} 100\%$$

Modal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasional, semakin rendah persentase belanja modal yang digunakan untuk membangun infrastruktur ekonomi masyarakat. Perhitungan Rasio Kesenjangan dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Mahmudi, 2016):

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tarakan dalam penelitian ini merupakan suatu penilaian terhadap kemajuan implementasi pelaksanaan tugas dan aktivitas Pemerintah Kota Tarakan di bidang keuangan selama periode 2018 hingga 2022. Data yang dianalisis berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tarakan yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Tarakan. Analisis ini diharapkan dapat

memberikan pandangan mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Tarakan. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Perhitungan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi

No	Rasio Keuangan	Tahun (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Derajat Desentralisasi	8,17	7,95	11,66	14,11	13,02
2	Kemandirian Keuangan Daerah	9,27	9,60	13,86	17,22	15,03
3	Efektivitas PAD	54,03	97,07	151,16	133,86	90,16
4	Efisiensi Keuanga Daerah	99,36	82,84	107,10	91,27	100,20
5	Pertumbuhan Pendapatan	14,37	3,97	0,40	15,17	2,97
6	Pertumbuhan Belanja	12,62	-13,30	29,80	-1,85	13,05
7	Keserasian Belanja Operasi	70,97	78,29	71	74,68	71,91
8	Keserasian Belanja Modal	29,02	21,66	28,12	24,86	27,71

3.1. Rasio Derajat Desentralisasi

Berdasarkan analisis dari tabel diatas, terlihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Tarakan yang di ukur melalui Rasio Derajat Desentralisasi, dikategorikan sangat kurang, pada tahun 2018, tercatat bahwa Rasio Derajat Desentralisasi pemerintah kota Tarakan mencapai 8,17%. Pada tahun 2019, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 7,95% masih dengan kategori sangat kurang. Selanjutnya, terjadi peningkatan pada tahun 2020 menjadi 11,66% dengan kategori kurang. Pada tahun 2021, tercatat kenaikan menjadi 14,11% juga dengan kategori kurang, namun pada tahun 2022, terjadi penurunan kembali menjadi 13,02% namun masih dengan kaegori kurang.

Berdasarkan penjelasan dan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih memiliki keterbatasan dalam mendukung pembangunan di kota Tarakan. Faktor ini muncul karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tarakan relatif kecil jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah menyebabkan pendapatan asli daerah di Kota Tarakan menjadi rendah, sehingga PAD tidak memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan di wilayah tersebut. Pemerintah Kota Tarakan masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam mendanai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah Kota Tarakan dapat berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memanfaatkan potensi yang sudah ada serta menggali potensi-potensi pendapatan baru.

3.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan yang tercantum dalam tabel 1 di atas, kinerja keuangan pemerintah kota Tarakan berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Kota Tarakan mencapai rasio sebesar 9,27%, yang dapat dikategorikan sebagai sangat rendah dengan pola hubungan instruktif. Kemudian, terjadi peningkatan pada tahun 2019 menjadi 9,60%, juga tetap dalam kategori sangat rendah dengan pola hubungan instruktif. Pada tahun 2020, rasio kemandirian keuangan daerah meningkat menjadi 13,86% masih dengan kategori sangat rendah. Lalu pada tahun 2021 mencapai 17,22%, dan pada tahun 2022 sebesar 15,03% juga masih dalam kategori sangat rendah dengan pla hubungan instruktif. Sehingga dari angka tersebut menunjukkan tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Tarakan terhadap transfer dari pihak eksternal, terutama dari pemerintah pusat dan provinsi, yang masih sangat tinggi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa selama lima tahun, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada pemerintah kota Tarakan menunjukkan rata-rata kemandirian yang masih tergolong dalam kategori yang sangat rendah, dengan pola hubungan Instruktif. Dimana peran pemerintah pusat masih lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah itu sendiri. Hal ini menunjukknn bahwa daerah belum mampu sepenuhnya melaksanakan otonomi daerah, dibuktikan dengan hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama lima tahun yaitu 2018 hingga 2022 masih berada pada interval 0-25%.

3.3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli daerah

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efektivitas yang terdapat dalam tabel 1 di atas, terlihat bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kota Tarakan pada tahun 2018 tergolong tidak efektif karena nilai yang diperoleh berada dibawah 75% yakni sebesar 54,03%. Sementara itu, untuk tahun 2019 dan 2022, kinerjanya tergolong cukup efektif karena berada dalam rentang skala 90-99%, yakni masing-masing sebesar 97,07% dan 90,16%. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021 tergolong sangat efektif karena nilai yang diperoleh sudah melebihi 100%, yaitu sebesar 151,16% dan 133,86%. Hal ini kemudian disebabkan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dimana pemerintah kota Tarakan juga mampu merealisasikan PAD dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu pada tahun 2020 dan tahun 2021. Untuk itu, Pemerintah kota Tarakan harus terus mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari potensi-potensi yang sudah ada dan kemudian menggali potensi-potensi yang baru sehingga dapat menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

3.4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 1 diatas, Kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan Rasio Efisiensi pada tahun 2018 sebesar 99,36%, tahun 2019 sebesar 82,84% dan 2021 tergolong tidak efisien karena mencapai nilai 107,10%. Kondisi ini disebabkan oleh realisasi pendapatan yang lebih kecil daripada realisasi belanja daerah. Pada tahun 2021 tergolong efisien karena memperoleh nilai 91,27%. Kemudian pada tahun 2022 tergolong tidak efisien karena berada pada interval diatas 100% yaitu 100,20%.

3.5. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan daerah dapat di ketahui bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah kota Tarakan pada tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun fluktuatif. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 sebesar 14,37% . Sementara pada tahun 2019 turun sebesar 3,97% . Lalu pada tahun 2020 kembali menurun sebesar 0,40%. Kemudian kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 15,17% pada tahun 2021. Sementara pada tahun 2022 terjadi penurunan pertumbuhan sebesar 2,97%.

3.6. Rasio Pertumbuhan Belanja

Pada tahun 2018 pertumbuhan belanja Pemerintah Kota Tarakan meningkat sebesar Rp 98.639.596.170,61 atau 12,62% dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp -117.085.192.529,18 atau -13,30%, dan kembali naik pada tahun 2020 sebesar Rp 227.363.258.466,33 atau 29,80%. Lalu pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar Rp-18.392.821.220,49 atau -1,85%. Kemudian di tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp 126.870.136.313,08 atau 13,05%.

Trend pertumbuhan belanja Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2018 – 2020 tergolong fluktuatif. Dimana tahun 2018 tumbuh sebesar 12,62% namun pada tahun 2019 turun sebesar -13,30% kemudian kembali naik pada tahun 2020 sebesar 29,80%. Lalu pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar -1,85%. Kemudian di tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 13,05%. Penurunan pertumbuhan belanja pada tahun 2019 dan 2021 disebabkan karena Belanja daerah lebih kecil daripada tahun sebelumnya.

3.7. Rasio Keserasian Belanja Operasi dan Belanja Modal

Dari data yang terdapat dalam tabel 1 diatas, terlihat bahwa Rasio Keserasian Belanja Operasi dan Rasio Keserasian Belanja Modal yang belum stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, Rasio belanja operasi mencapai 70,97%, mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 78,29%, lalu mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 71,00%. Pada tahun 2021, Rasio ini kembali menunjukkan peningkatan menjadi 74,68%, namun pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 71,91%. Sehingga, rata-rata rasio belanja operasional selama periode tersebut adalah sebesar 73,15%. Sementara itu, Berdasarkan Rasio Belanja Modal pada tahun 2018 sebesar

29,02% mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 21,66%. Pada tahun 2020, rasio ini kembali naik menjadi 28,12% lalu pada tahun 2021 turun menjadi 24,86%. Kemudian pada tahun 2022, kembali mengalami kenaikan menjadi 27,71%. Sehingga rata-rata rasio belanja modal selama periode tersebut adalah sebesar 26,47%.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sumber dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Tarakan masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasional, sehingga rasio belanja modal relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan rata-rata rasio belanja operasional yang masih tinggi dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Pemusatan alokasi dana yang signifikan untuk belanja operasional terutama disebabkan oleh ukuran besar dari dinas otonomi dan belanja pegawai untuk pembayaran gaji PNS. Keadaan ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Tarakan lebih condong pada pengeluaran rutin untuk memenuhi aktivitas pemerintahan, sementara upaya pembangunan daerah masih belum mendapat perhatian yang cukup.

Kondisi ini muncul karena belum adanya panduan yang jelas mengenai belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berorientasi pada pemenuhan belanja operasional. Dampaknya, anggaran belanja modal untuk Pemerintah Kota Tarakan masih dianggap terbatas atau belum memadai. Oleh karena itu, diharapkan ke depannya, Pemerintah Kota Tarakan dapat lebih memprioritaskan pelayanan langsung kepada masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada publik. Sebab pada dasarnya, dana yang terdapat dalam anggaran daerah merupakan dana publik yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

4. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian, analisis dan pembahasan maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kota Tarakan berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi pada tahun 2018, sebesar 8,17%. Pada tahun 2019, terjadi penurunan menjadi 7,95%. Kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2020 menjadi 11,66%. Pada tahun 2021, kembali terjadi peningkatan menjadi 14,11%. namun pada tahun 2022, kembali terjadi penurunan menjadi 13,02%, Artinya Pendapatan Asli Daerah memiliki kemampuan yang masih kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena PAD kota Tarakan masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan total pendapatan daerah.
- 2) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kota Tarakan berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan Pemerintah kota Tarakan berada pada rasio 9,27% pada tahun 2018 dikategorikan sangat rendah, lalu meningkat pada tahun 2019 menjadi 9,60% dengan kategori sangat rendah, tahun 2020 sebesar 13,86% dan tahun 2021 sebesar 17,22% serta pada tahun 2022 sebesar 15,03% masih dengan kategori sangat rendah. Sehingga dari angka tersebut menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah kota Tarakan terhadap bantuan dari pihak eksternal, terutama bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, yang masih sangat tinggi.
- 3) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kota Tarakan berdasarkan rasio efektivitas pada tahun 2018 tergolong tidak efektif karena diperoleh nilai dibawah 75% yaitu 54,03%. Untuk tahun 2019 dan 2022, tergolong cukup efektif karena berada pada skala 90-99% masing-masing adalah sebesar 97,07% dan 90,16%. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021, tergolong sangat efektif karena hasil yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu 151,16% dan 133,86%. Hal ini kemudian disebabkan adanya peningkatan pendapatan asli daerah yang dimana Pemerintah Kota Tarakan juga telah mampu merealisasikan PAD dari anggaran yang telah ditetapkan.
- 4) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kota Tarakan berdasarkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menunjukkan pada tahun 2018 sebesar 99,36%, tahun 2019 sebesar 82,84% dan 2021 tergolong tidak efisien karena mencapai nilai 107,10% Kondisi ini disebabkan oleh realisasi pendapatan yang lebih kecil daripada realisasi belanja daerah. Pada tahun 2021 tergolong efisien karena memperoleh nilai 91,27%. Kemudian pada tahun 2022 tergolong tidak efisien karena berada pada interval diatas 100% yaitu 100,20%. Hal ini menunjukkan bahwa total realisasi belanja daerah pada pemerintah kota Tarakan lebih besar dibandingkan dengan total realisasi pendapatan. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Kota Tarakan dapat meminimalisir

jumlah belanjanya disesuaikan dengan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

- 5) Kinerja Keuangan Pemerintah kota Tarakan berdasarkan Rasio Pertumbuhan terhadap Pendapatan daerah mengalami pertumbuhan yang positif meskipun fluktuatif dimana rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan daerah mencapai 7,05% yang menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kemudian Rasio Pertumbuhan Belanja daerah juga menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 7,24%. Namun pada tahun 2019 terjadi pertumbuhan yang negatif yaitu -13,30% dan pada tahun 2021 sebesar -1,85%.
- 6) Rasio Keserasian Belanja Operasi dan Rasio Keserasian Belanja Modal belum stabil dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2018, Rasio belanja operasi mencapai 70,97%, mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 78,29%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 71,00%. Pada tahun 2021, rasio ini kembali menunjukkan peningkatan menjadi 74,68%, namun pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 71,91%. Sementara itu, Berdasarkan Rasio Belanja Modal pada tahun 2018 sebesar 29,02% mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 21,66%. Pada tahun 2020, kembali mengalami kenaikan menjadi 28,12% lalu pada tahun 2021 turun menjadi 24,86%. Kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi 27,71%.

Daftar Pustaka

- Anshori, Z. (2019). Studi Kasus Pada BPKAD Kab. Lamongan. 4(2), 1113-1132.
- Anton, F. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. Majalah Ilmiah INFORMATiKA, 1(2), 61-80.
- Eksandy, A., Hakim, M. Z., & Ekawati, E. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015). COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 2(2), 85.
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). Jurnal Akuntansi Trisakti, 7(2), 231-246. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (ketiga). YKPN.
- Mardiasmo, 2018. Akuntansi sektor publik, Andi: Yogyakarta.
- Maskuna, A., & et al. (2018). Analisis Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2011-2015. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689-1699.
- Nurhayati. (2015). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, 4(1), 55-66.
- Oktrivina, A., Siregar, D., & Mariana, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok-Jawa Barat). Journal IMAGE |, 9(1), 1-19.
- Rahmadani, R., & Rudini, A. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2018-2021. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951-952., 8(2), 133-143. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 - 2015. Accountability, 6(1), 45.
- Purba, S. (2021). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan ANgggaran Belanja Tahun 2014-2019 Pada Pemko Tebing Tinggi. Journal Of Management, Accounting, Economic and Business, 02(01), 142-150.
- Sitorus, P. B., Yusnita, Ashari, M. A., Rusiadi, & Rangkutty, D. M. (2023). Studi Kajian Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. Student Research Journal, 1(4), 62-69.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif (Cetakan 1). Alfabeta.